

PENGARUH PEMBANGUNAN MAMMINASATA TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL EKONOMI DAN EKOLOGI PADA MASYARAKAT LOKAL

Impacts of Megapolitan Development on Socio-Economic and Ecological Change of the Local Community

Rimarty Anggun Widiatri*, Arya Hadi Dharmawan, dan Rilus A. Kinseng

Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, IPB

*) Email : anggun.widiatri@gmail.com

Diterima 17 Februari 2014 / Disetujui 14 Juli 2014

ABSTRACT

The scheme of development planning in chasing the growth economy by urban development such as Mamminasata city obviously influencing social change into local community. The purposes of this study were to explain and analyze the development impact of Mamminasata into socio-economic, sosio-culture and sosio-ecological on local community. This study used a qualitative approach supported by quantitative approach. The results of this study showed that (1) land conversion and other transaction and the composition in taking occupancy in the urban by local community of Samata and Borongraukang have been increasing respectively. (2) Local community of Samata is more effected by the existence of urban population more than Borongraukang, which could bring the declination of collectivity between local community. (3) Socio-ecological change due to land conversion, the disturbance of water irrigation's channeling and dry process of gabah (paddy) are the form of alienation towards local community (4) Dependency on the other hand has led the underdevelopment country into social distinction, emergence of individual community (gesselschaft), diffusion of urban institution and dependency of capital access on urban area.

Keywords: Mamminasata, development, social change, local community, dependency, reproduction of dependency

ABSTRAK

Skema perencanaan pembangunan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan perkotaan seperti kota Mamminasata jelas mempengaruhi perubahan sosial dalam masyarakat setempat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis dampak pembangunan Mamminasata menjadi sosio-ekonomi, sosio-budaya dan sosio-ekologis pada masyarakat setempat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang didukung oleh pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) konversi lahan dan transaksi lain dan komposisi dalam mengambil hunian di perkotaan dengan masyarakat lokal Samata dan Borongraukang memiliki peningkatan masing-masing. (2) Masyarakat lokal dari Samata lebih dipengaruhi oleh keberadaan penduduk perkotaan lebih dari Borongraukang, yang bisa membawa deklinasi kolektivitas antara masyarakat setempat. (3) Perubahan Sosial ekologi akibat dari konversi lahan, gangguan penyaluran air irigasi dan proses kering gabah (padi) adalah bentuk keterasingan terhadap masyarakat setempat (4) Ketergantungan pada sisi lain telah menyebabkan negara keterbelakangan dalam perbedaan sosial, munculnya komunitas individu (Gesselschaft), difusi lembaga perkotaan dan ketergantungan akses permodalan di daerah perkotaan.

Kata kunci: ketergantungan, mamminasata, masyarakat setempat, pembangunan, perubahan sosial, reproduksi ketergantungan

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan wilayah dengan membentuk beberapa Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang menjadi ambisi untuk mengejar percepatan pembangunan ekonomi nasional tidak terlepas dari usaha pemerintah untuk mewujudkan komoditas yang dapat bersaing di pasar global

dari pembentukan sistem hubungan perekonomian yang strategis dalam kerjasama bilateral maupun multilateral dengan negara-negara pengekspor terutama di negara maju. Pembangunan Kawasan Perkotaan Mamminasata merupakan salah satu strategi untuk mengkondisikan terwujudnya percepatan pembangunan ekonomi melalui penyatuan kawasan perkotaan yang terdiri atas Kota Makassar sebagai kawasan perkotaan inti, Kawasan Perkotaan Maros di Kabupaten Maros, Kawasan Perkotaan

Sungguminasa di Kabupaten Gowa, Kawasan Perkotaan Takalar di Kabupaten Takalar sebagai kawasan perkotaan di sekitarnya yang membentuk kawasan megapolitan.

Penerapan konsep pembangunan kota terintegrasi tentunya memberi dampak perubahan yang besar pada masyarakat lokal terutama berada pada kawasan yang mengalami secara perubahan fungsi ruang tersebut, yakni tingginya frekuensi pelepasan tanah dari petani yang memiliki dan atau mengolah lahan pertanian produktif. Lahan-lahan yang dikonversikan untuk kepentingan industrialisasi dan sarana infrastruktur dari tahun ke tahun pada akhirnya akan semakin memberikan tarikan besar bagi investor asing maupun dalam negeri demi mewujudkan ambisi pertumbuhan ekonomi wilayah.

Paradigma yang muncul dalam program pembangunan saat ini sangat khas dengan paradigma neoliberal dimana tidak mengarahkan pandangannya pada problem-problem struktural yang ada di masyarakat. Pada pemerintahan Orde Baru, otoritas terkutub pada pemerintah pusat dan proses pembangunan dibangun dalam logika top-down. Pemerintah Orde Baru mengkorporatisasi pemerintah desa dengan logika birokratik-politis, sehingga dalam struktur pemerintah desa era Orde Baru, posisi pemerintah desa adalah posisi birokrasi alat negara.

Sedangkan pada pasca reformasi, Indonesia mengalami perubahan paradigma yang sangat mendasar dalam logika pembangunan. Pembangunan hanya diarahkan pada bagaimana membangun kemandirian masyarakat melalui stimulus modal, namun bukan pada kerangka struktur sosial-politik-ekonominya. Pasca keruntuhan rezim Orde Baru, pembangunan di Indonesia semakin mendapatkan perhatian dari lembaga-lembaga donor asing, seperti World Bank atau International Development dari masing-masing negara. Sehingga perubahan paradigma yang terjadi adalah pemindahan otoritas dari negara menuju kepada kekuatan pasar melalui berbagai injeksi program pembangunan. Tujuan utamanya bukan sekedar memberi kapasitas berlebih kepada masyarakat, melainkan juga memberi kapasitas masyarakat untuk beradaptasi dengan logika ekonomi pasar. Sehingga transformasi yang terjadi adalah setiap negara akan menjadi peka dan jatuh dalam jebakan kebutuhan pasar yang akhirnya menjadikan globalisasi ekonomi sebagai basis instrumen pembangunan (Li 2012).

Perubahan tata ruang di balik pembangunan kawasan perkotaan Mamminasata ini disinyalir diikuti oleh perubahan pola perilaku, nilai-nilai tradisi dan budaya, struktur pelapisan sosial masyarakat serta dimensi-dimensi perubahan lain yang akan memperlihatkan transformasi ekonomi dan ekologisnya. Pembangunan ekonomi tentu saja akan menunjukkan siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan sehingga ketimpangan sosial-ekonomi tidak bisa dipungkiri terjadi akibat pembangunan ekonomi wilayah ini. Oleh sebab itu, pada penelitian ini penting untuk mengkaji bagaimana pembangunan kota megapolitan Mamminasata dalam memberikan pengaruh perubahan sosial ekonomi dan ekologi yang terjadi pada masyarakat. Sehingga berdasarkan perumusan masalah di atas, maka pertanyaan yang muncul adalah : Bagaimana bentuk perubahan (sosial-ekonomi, sosial-budaya dan sosial-ekologis) bagi masyarakat lokal sebagai manifestasi dari proyek pembangunan kota megapolitan Mamminasata ?

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan penjelasan di atas, maka dirumuskan beberapa masalah yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Sejauhmana perubahan sosial-ekonomi, sosial-budaya dan sosial-ekologis yang terjadi pada masyarakat lokal akibat proyek pembangunan kota megapolitan Mamminasata ?
2. Bagaimana bentuk marjinalisasi dari pembangunan Mamminasata bagi masyarakat lokal ?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan proses perubahan sosial (struktur sosial dan kebudayaan) yang terjadi pada aspek sosial, ekonomi dan ekologi masyarakat lokal yang berada pada wilayah pembangunan kawasan Mamminasata
2. Menganalisis bentuk marjinalisasi dari pembangunan Mamminasata pada masyarakat lokal.

Kegunaan Penelitian

Mengacu pada tujuan penelitian, maka kegunaan dilaksanakannya penelitian ini terbagi menjadi kegunaan, diantaranya:

1. Pada ranah akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah khususnya pada sosiologi perubahan sosial, dapat menambah pengetahuan terhadap kondisi perubahan sosial yang terjadi di wilayah Sulawesi khususnya di kota metropolitan Makassar dan sekitarnya.
2. Pada tataran praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai : 1). Sarana untuk mengevaluasi kebijakan pembangunan wilayah kota baru terintegrasi Mamminasata terkait implementasi dan dampaknya terhadap sosial, ekonomi dan ekologi pada masyarakat lokal; 2). Bahan rujukan dalam melakukan penguatan sosial pada masyarakat lokal yang mengalami resiko pembangunan yang signifikan.

PENDEKATAN TEORITIS

Tinjauan Pustaka

Konsep Perubahan Sosial

Perubahan sosial sebagaimana yang dijelaskan oleh Wilbert E. Moore (1968) dalam Vago (1980) yaitu perubahan signifikan pada struktur sosial (pola aksi sosialnya dan interaksi sosial) yang berkonsekuensi terhadap manifestasi dari struktur seperti yang terkandung dalam norma (aturan perilaku), nilai-nilai dan produk budaya dan simbol. Sehingga Vago mengungkapkan bahwa terjadinya perubahan struktur sosial pada pola perilaku sosial masyarakat yang meliputi status sosial, peran, kelompok sosial, kelembagaan/ institusi sosial baik dalam sistem keluarga, agama, politik merupakan perubahan sosial (social change).

Perubahan sosial tentunya tidak lepas dari apa yang berubah. Perubahan sosial akan menimbulkan perubahan identitas berupa struktur sosial, pola perilaku sosial, interaksi sosial, norma, nilai, fenomena kultural, laju teknologi dan lingkungan. Perubahan yang berlangsung dimana-mana menjadi perhatian bagi masyarakat dan terdapat juga komitmen untuk berubah yang tidak dapat dipungkiri untuk dicegah. Elemen-elemen yang kemudian dianalisis adalah apa yang berubah, seberapa dalam dan seberapa cepat perubahan tersebut terjadi serta tipe perubahan yang mencakup sumber perubahan, besaran dan arah perubahan itu sendiri serta bagaimana pola dari perubahan sosial yang terjadi. Adanya perubahan tentunya tidak terlepas dari reaksi yang ditimbulkan. Oleh sebab itu akan dianalisis bagaimana reaksi dari perubahan tersebut, apakah reaksinya mendorong perubahan atau justru menghambat perubahan itu sendiri (Vago 1980).

Konsep Ketergantungan dan Keterbelakangan

Secara lahiriah, modernisasi yang berlangsung di negara berkembang membawa kemajuan di segala aspek dalam sudut pandang pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Namun pada kenyataannya kemajuan yang signifikan pada masyarakat hanyalah kemajuan semu akibat semakin bertautnya ketergantungan negara berkembang terhadap negara maju. Adanya keinginan untuk memperbaiki situasi ekonomi politik di negara berkembang dengan jalan menjadikan negara-negara berkembang mampu memproduksi bahan pangan dan bahan mentah yang diperlukan negara-negara industri untuk diolah dan disediakan untuk kebutuhan negara-negara berkembang merupakan sebab utama munculnya ketergantungan.

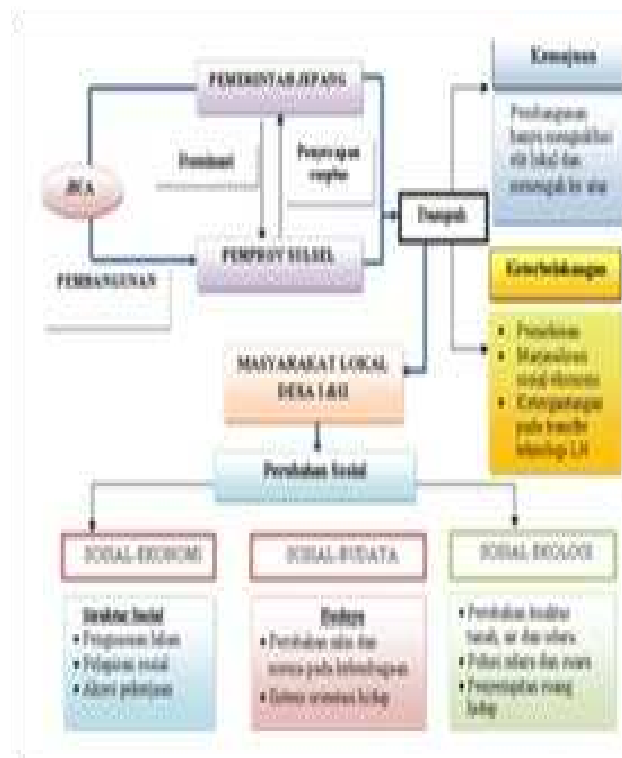
Pendekatan pembangunan melalui modernisasi pada perjalanannya menuai kritik dari kalangan neo-Marxisme dimana Frank dalam Suwarsono dan Y.So (2006) melihat adanya sesuatu yang salah di dalam dunia ketiga sehingga menyebabkan tidak berkembang. Teori modernisasi melihat bahwa negara dunia ketiga sedang berada dalam tahap perkembangan yang seharusnya dapat menjadikan negara barat sebagai acuan dalam arah dan jalan pembangunan untuk dapat menjadi modern. Frank menganggap bahwa negara dunia ketiga tidak perlu untuk mengikuti arah dan jalur pembangunan negara-negara maju karena memiliki pengalaman kesejarahan yang berbeda. Negara-negara barat tidak pernah mengalami fase kolonialisme sementara negara berkembang merupakan negara koloni dari negara barat tersebut. Frank melihat bahwa bukan faktor internal berupa tradisionalisme dan feodalisme yang membuat negara terbelakang, akan tetapi pengaruh eksternal yakni dominasi asing sehingga terjadi dialektika terhadap negara maju terhadap negara berkembang dimana dunia ketiga dipaksa untuk mengikuti perkembangan negara maju yang justru semakin menggiring kepada keterbelakangan ekonomi.

Kolonialisme dan dominasi negara-negara maju terhadap negara berkembang inilah yang disebut sebagai development of underdevelopment atau mwujudnya keterbelakangan. Keterbelakangan bukanlah sesuatu yang alami dan spontan terjadi melainkan sebagai sesuatu yang diciptakan dan mengalami proses untuk dialami oleh negara Dunia Ketiga. Terdapat dua entitas dalam artikulasi interaksi ini yang disebut sebagai model satelit-metropolis. Hubungan ini berawal dari negara penjajah

yang membangun wilayahnya pada negara jajahan di Dunia Ketiga dalam rangka menyerap surplus ekonomi untuk disalurkan kepada negara maju yang merupakan metropolis, sementara negara-negara Dunia Ketiga inilah yang disebut satelit. Hubungan satelit-metropolis bukan hanya diperuntukkan bagi antar negara, namun juga berlaku pada hubungan lokal-regional yang berlangsung di dalam negara Dunia Ketiga tersebut secara beruntun dengan tujuan untuk mengambil surplus ekonomi. Negara tergantung mengalami penyedotan surplus ekonomi yang menyebabkan stagnasi pada pasar dalam negeri dan justru memindahkan keuntungan pertumbuhan ke negara dominan (Roxborough 1986).

Kerangka Pemikiran

Pembangunan proyek pembangunan Mamminasata membutuhkan anggaran negara yang tidak sedikit, sehingga untuk mwujudkannya pemerintah tetap melanggengkan kontrak kerjasama dengan korporasi asing (JICA) yang merupakan bentuk korporasi manifestasi dari ODA (Official Development Assistance) Jepang. Kerjasama yang terbina oleh Negara sentral terhadap negara pinggiran mwujudkan pemindahan surplus ekonomi dari dalam negeri kepada pemerintah Jepang karena adanya bantuan modal (hibah) dan pinjaman yang diberikan untuk membangun industri-industri dan infrastruktur berteknologi tinggi sebagai pendukung terwujudnya kawasan Mamminasata. Pemerintah akan terus tergantung dan terbelakang karena pembangunan yang terjadi di negara pinggiran sebenarnya dimaksudkan hanya untuk memberikan keuntungan kepada Negara sentral.



Gambar 1. Kerangka Pikir Proyek Pembangunan Mamminasata dan Pengaruhnya Terhadap Sosial Ekonomi dan Ekologi Masyarakat Lokal

Selain itu pembangunan megapolitan Mamminasata merupakan salah satu model pembangunan berbasis pertumbuhan ekonomi pasar yang dapat mempengaruhi transisi perubahan pada masyarakat lokal. Pembangunan dengan transformasi kawasan publik baik cakupannya besar maupun kecil akan mendorong pada perubahan baik ditinjau dari aspek sosial, ekonomi dan ekologi yang dapat diukur oleh perubahan struktur sosial (kelompok, stratifikasi dan kelembagaan sosial) dan kultur sosial masyarakat (penggunaan teknologi, mata pencaharian dan sistem kepercayaan). Setelah berlangsungnya proyek pembangunan Mamminasata, masyarakat di sisi lain akan banyak menghadapi bentuk resiko-resiko yang muncul dari aspek sosial, ekonomi dan ekologis. Aspek sosial akan menimbulkan marjinalisasi pada masyarakat lokal itu sendiri. Pembangunan yang merupakan imitasi pada pembangunan kota negara maju ini pada akhirnya akan menimbulkan ketimpangan sosial-ekonomi dimana akan terlihat pihak yang diuntungkan atau mengalami kemajuan dan pihak yang mendapatkan resiko atau semakin mengalami keterbelakangan akibat pembangunan Mamminasata.

PENDEKATAN LAPANG

Lokasi dan Waktu Penelitian

Pelaksanaan pengumpulan data penelitian ini telah dilakukan pada bulan Juli hingga bulan September 2013. Untuk mendapatkan data mengenai perubahan sosial melalui skala likert, maka dilakukan pemilihan responden dilakukan melalui stratified sampling, dimana 60 orang responden diambil dari dua populasi yang berkarakteristik heterogen, yakni berdasarkan faktor geografisnya yaitu jarak. Populasi responden dari dua desa dipilih berdasarkan jarak, dimana desa pertama dekat dengan kawasan perkotaan sedangkan desa cukup jauh dengan kawasan perkotaan. Heterogenitas mempunyai arti yang signifikan pada pencapaian tujuan penelitian. Stratified sampling merupakan teknik probabilitas sampling karena setiap elemen populasi mempunyai kemungkinan yang sama untuk dijadikan responden (Bryman 2004).

Penelitian ini dilaksanakan di dua lingkungan dalam satu kelurahan, yakni kelurahan Samata, kabupaten Gowa. Kedua lokasi tersebut merupakan kawasan yang dapat dijadikan sebagai representasi wilayah yang secara langsung mengalami pembukaan kota proyek pembangunan Mamminasata, antara lain:

1. Lingkungan Samata, Kabupaten Gowa kawasan yang dijadikan sebagai wilayah Pembangunan jalan by-pass sebagai poros penghubung antara kota Makassar dan kabupaten Gowa. Pembangunan kawasan ini telah menjadi kawasan pemukiman dan sarana publik lainnya yang menyebabkan pelepasan lahan pertanian dari tahun ke tahun.
2. Lingkungan Borongraukang, Kelurahan Samata merupakan kawasan berada dalam lingkup kelurahan Samata namun tidak mendapatkan pengaruh langsung dari pembukaan jalan by-pass sebagai jalur penghubung antara Kabupaten Gowa dan Kota Makassar.

Pada pengambilan lokasi populasi responden dilakukan pada dua lokasi penelitian dilakukan melalui stratified sampling yakni berdasarkan faktor geografisnya yaitu

jarak. Desa pertama dekat dengan kawasan perkotaan sedangkan desa kedua cukup jauh dengan kawasan perkotaan. Pengambilan data mengenai perubahan sosial dilakukan pemilihan 30 orang responden secara random sampling melalui skala likert. Sementara itu, penentuan informan kasus dilakukan secara purposive sampling dari kasus yang paling terdampak mengalami perubahan sosial yang cukup signifikan akibat pembangunan Mamminasata.

Teknik Pengumpulan Data

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif didukung dengan data kuantitatif. Kegiatan penelitian ini dilakukan melalui dua tahap dimana akan dikumpulkan data kuantitatif melalui metode survei dan data kualitatif untuk menganalisa kasus melalui wawancara mendalam. Rincian tahapan penelitian ini antara lain :

1. Memahami profil dari lokasi penelitian.

Kegiatan ini dilakukan untuk memahami gambaran secara umum tentang lokasi yang diteliti melalui pengambilan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat desa dan beberapa informan lainnya yang mengetahui kondisi demografis, kondisi fisik serta kondisi sosial lainnya serta pengumpulan dokumentasi dari lembaga pemerintahan terkait pelaksanaan pembangunan proyek Mamminasata.

2. Menelusuri pengaruh dari proyek pembangunan Mamminasata terhadap perubahan sosial, ekonomi dan ekologi secara makro maupun mikro pada masyarakat lokal.

Kegiatan dilakukan melalui dua tahap dengan melakukan pengumpulan data makro yang menguraikan tentang perubahan sosial akan dianalisa secara kuantitatif. Pengumpulan data makro yaitu melalui survei terhadap 30 responden pada dua desa yang telah dipilih secara stratified sampling melalui wawancara dengan menggunakan kuesioner untuk melihat perbandingan perubahan sosial-ekonomi, sosial-budaya dan sosial-ekologi yang disajikan melalui data kuantitatif-deskriptif.

3. Menguraikan dan menganalisis proses marjinalisasi sosial ekonomi akibat pembangunan Mamminasata.

Pengumpulan data yang menguraikan dampak dari perubahan-perubahan sosial yang muncul secara mikro akan dianalisa melalui analisa kualitatif. Pengumpulan data mikro melalui wawancara mendalam kepada informan kasus yang mewakili dari masyarakat pada dua lokasi yang paling mengalami pengaruh langsung dari pembangunan Mamminasata dan mengumpulkannya melalui catatan harian untuk mendapatkan informasi.

HASIL PENELITIAN

Skenario Pembangunan Kawasan Perkotaan Mamminasata

Skenario kebijakan penataan rencana tata ruang wilayah Mamminasata diawali oleh kondisi pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan, khususnya kota Makassar yang berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional, yakni sekitar 8%. Implikasinya akan sangat berpengaruh pada

pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi akibat aktivitas ekonomi yang semakin meningkat pesat yakni antara lain meningkatnya jumlah penduduk, pertumbuhan kepemilikan kendaraan semakin meningkat, kondisi sarana dan prasarana jalan menurun, peningkatan kemacetan lalu lintas, peningkatan aktivitas bandara dan pelabuhan, penurunan aksesibilitas angkutan kota dan manajemen pengaturan lalu lintas. Namun di sisi lain, ketersediaan wadah atau ruang untuk mengakomodasi aktivitas penduduk semakin terbatas.

Pembangunan perkotaan yang merupakan dampak dari pembangunan ekonomi daerah mengakibatkan lahirnya kota-kota yang berdasarkan indikator jumlah penduduk telah layak disebut sebagai kota besar atau kota metropolitan. Jumlah penduduk Sulawesi Selatan di tahun 2010 berkisar 7,9 juta jiwa dimana penduduk yang berada di kawasan perkotaan Mamminasata sekitar 2,4 juta jiwa atau 30,38 persen. Sehingga dapat dipastikan penduduk kota Makassar sendiri berkisar 1,2 juta jiwa atau 50 persen dari penduduk Mamminasata dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 1,78 per tahun.

Gagasan pembuatan rancangan peraturan presiden (Raperpres) mengenai kawasan perkotaan Mamminasata mulai dibahas pada tingkat Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten/Kota se-Mamminasata hingga berlanjut ke tingkat Dirjen Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum sejak tahun 2007. Pada saat yang sama, badan pengelolaan Kawasan Perkotaan Mamminasata telah ditetapkan dalam peraturan gubernur yang diberi nama Badan Kerjasama Pembangunan Metropolitan Mamminasata (BKSPMM) yang berfungsi sebagai badan koordinasi. Tindak lanjutnya kemudian secara structural dibentuk Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Mamminasata (UPTDM) pada Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Propinsi Sulawesi Selatan yang berfungsi sebagai pelaksanaan operasional kegiatan perkotaan Mamminasata. Pada level pemerintah pusat, proses pembahasan Raperpres Kawasan perkotaan Mamminasata kemudian berjalan terus hingga 67 kali rapat pembahasan. Pada akhirnya finalisasi jatuh pada tanggal 13 Agustus 2011 dengan dibentuknya regulasi rencana pembangunan agar mendapatkan kekuatan hukum, yakni ditetapkannya peraturan presiden (perpres) No. 55 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Mamminasata pada tanggal 9 September 2011 (Sutiksno 2012)

Investasi JICA pada pembangunan kota Mamminasata

Pembangunan kawasan perkotaan Mamminasata merupakan hasil kerjasama teknis antara JICA (Japan International Cooperation Agency) dengan BKSP MM, UPTD Mamminasata dan Task Force Kota Baru Mamminasata dimulai sebagai tindak lanjut dari terbentuknya perpres No. 55 Tahun 2011 dan MoU pembangunan kota baru yang disepakati oleh Pemerintah Propinsi Sul-Sel dengan Pemkab Gowa, Pemkab Maros dan REI (Real Estate) Sul-Sel. Implementasinya dimulai melalui kegiatan Workshop Konsolidasi Lahan (land readjustment) dengan mengambil kasus yang berada di kecamatan Moncongloe, Maros dan kecamatan Pattalassang, Gowa.

Workshop yang dimotori oleh tim ahli arsitek dan urban planner ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai teori dan aplikasi garis besar konsolidasi lahan dan struktur kelembagaan dengan mengambil

pembangunan kota baru terintegrasi yaitu kota KOHOKU di Yokohama, Jepang sebagai acuan pembangunan kota Mamminasata. Proses izin AMDAL dilakukan dan diterima oleh gubernur propinsi Sulawesi Selatan di tahun 2007. Proyek ini kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum dan bekerjasama dengan tim ahli JICA yang telah melakukan uji kelayakan pembangunan jalan arteri Trans-Sulawesi Mamminasata Road (TSMR) pada tahun 2008.

Semakin banyak saham industri yang dikuasai asing akibatnya modal dalam negeri semakin terdominasi oleh kontrol perusahaan multinasional yang lebih dinamis dan modern sehingga sektor ekonomi yang belum terlalu berkembang disisakan untuk dari investasi modal dalam negeri. Pada akhirnya, di sisi lain kontrol formal maupun informal terhadap sumber-sumber ekonomi lokal untuk mengakumulasi keuntungan bagi kekuasaan di wilayah negara maju yang menimbulkan kerugian ekonomi setempat menurut James O' Connor dalam Roxborough (1986) inilah yang merupakan bentuk mekanisme imperialisme. Sehingga dalam hal ini yang berperan adalah campur tangan negara yang seharusnya dapat mengarahkan peruntukan sumber-sumber yang diperlukan untuk investasi modal asing terhadap proyek-proyek raksasa di dalam negeri (Roxborough 1986).

Dimensi Perubahan Sosial-Ekonomi

Perubahan pola penguasaan lahan

Berdasarkan pada grafik mengenai aktivitas konversi lahan dan nafkah ke non-pertanian pada lingkungan Samata dan Borongraukang, kemudian menggambarkan perbandingan spesifik antara lain :

a. Penilaian yang dominan setuju warga lingkungan Samata terkait aktivitas konversi lahan adalah berasal dari pandangan masyarakat yang melihat banyaknya warga yang kemudian melakukan transaksi tanah seperti maraknya aktivitas jual-beli tanah akibat pengaruh pembangunan jalan baik untuk jalan maupun pemukiman.

b. Sebagian responden di Samata juga mengaku masih menggarap lahan orang lain meskipun lahan miliknya atau lahan yang disewa sebagian atau seluruhnya sudah dijual. Penilaian kurang setuju pada beberapa responden dari warga Samata yaitu warga akan mempertahankan lahan selama tidak ada kebutuhan mendesak untuk tetap berusahatani, namun juga karena terkait dari nilai investasi lahan tersebut, bilamana sudah bernilai tinggi maka akan memungkinkan untuk dijual. Biasanya hasil keuntungannya untuk membeli lahan baru di daerah yang lebih murah nilai tanahnya. Gambaran spesifik perubahan pola penguasaan lahan pada masyarakat lokal di lingkungan Samata dan lingkungan Borongraukang dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

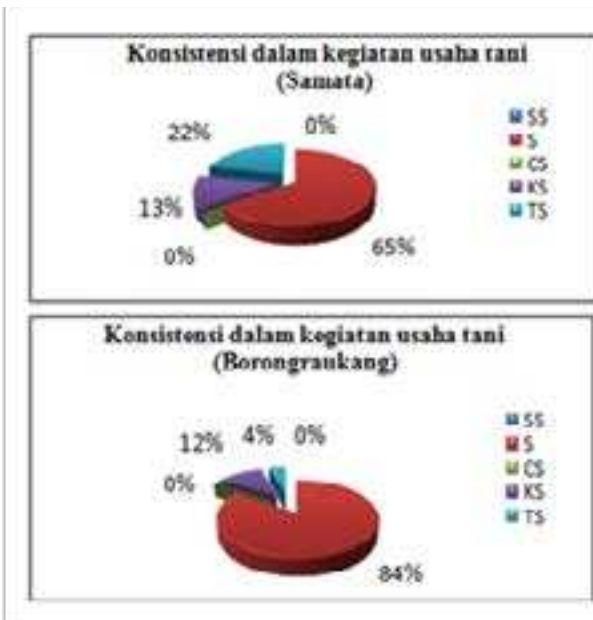
Sedangkan pada warga Borongraukang, responden yang dominan menilai kurang setuju yaitu pada peruntukan lahan yang tidak semata untuk investasi atau warisan namun juga sebagai sumber nafkah utama mereka. Pada warga Borongraukang grafik penilaian tidak setuju masih sangat signifikan. Warga setempat tidak setuju bila harus beralih nafkah jika sudah tidak memiliki lahan milik lagi, namun setidaknya masih dapat menyewa dan atau mengerjakan

sawah milik orang lain dengan menjadi buruh tani.



Keterangan : SS = Sangat setuju ; S= Setuju; CS= Cukup Setuju; KS= Kurang Setuju; TS= Tidak Setuju ; SMT = Samata; BR = Borongraukang

Gambar 2. Grafik perbandingan penilaian spesifik masyarakat lokal mengenai aktivitas konversi lahan dan nafkah menjadi non-pertanian di lingkungan Samata dan Borongraukang



Keterangan : SS = Sangat setuju ; S= Setuju; CS= Cukup Setuju; KS= Kurang Setuju; TS= Tidak Setuju ; SMT = Samata; BR = Borongraukang

Gambar 3 Grafik perbandingan penilaian spesifik masyarakat lokal mengenai konsistensi kegiatan usaha tani

di lingkungan Samata dan Borongraukang Sementara itu pada grafik konsistensi masyarakat dalam kegiatan usaha tani dapat menjelaskan signifikansi dari konsistensi dalam aktivitas usaha tani antara warga Samata dengan warga Borongraukang antara lain :

a. Seluruh responden di Borongraukang menilai setuju untuk mempertahankan lahan pertanian bilamana tidak ada kebutuhan mendesak dan masih akan tetap melakukan aktivitas usaha tani (baik sebagai penyewa -penggarap maupun buruh tani) meskipun sudah tidak memiliki lahan milik lagi.

b. Meskipun komposisi eksistensi masyarakat masih cukup tinggi di lingkungan Samata, sebagian besar responden setempat telah melakukan aktivitas nafkah ganda bahkan ada sebagian kecil sepenuhnya tidak lagi melakukan aktivitas usaha tani,dan berpindah pada sektor non-pertanian seperti buruh bangunan, pedagang dan sebagainya.

Perubahan Sosial- Budaya

Gambaran spesifik pada eksistensi tradisi dan budaya masyarakat di lingkungan Samata dan lingkungan Borongraukang dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Keterangan : SS = Sangat setuju ; S= Setuju; CS= Cukup Setuju; KS= Kurang Setuju; TS= Tidak Setuju ; SMT = Samata; BR = Borongraukang

Gambar 4. Grafik perbandingan penilaian spesifik masyarakat lokal terhadap keberlangsungan budaya tradisional di lingkungan Samata dan Borongraukang

Berdasarkan pada grafik mengenai eksistensi budaya tradisional pada masyarakat maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

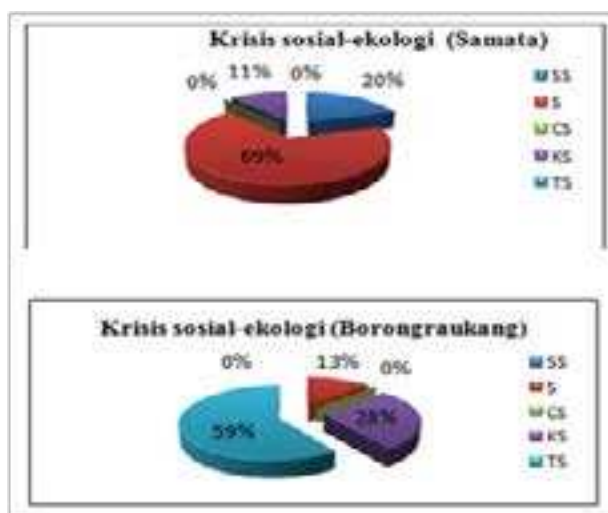
1. Secara keseluruhan, grafik menunjukkan bahwa secara signifikan perubahan budaya masyarakat yang tradisional menjadi budaya modern tidak terlihat secara drastis. Namun gejala itu akan memungkinkan terjadi di lingkungan Samata, dimana peningkatan ke arah negatif (kurang setuju dan tidak setuju) terhadap eksistensi budaya tradisional masyarakat meningkat secara berturut-turut. Sementara itu warga responden di Borongraukang justru menilai eksistensi kelembagaan dan budaya kolektif masih

terpelihara di antara warga .

2. Beberapa masyarakat Samata menilai tidak setuju dibandingkan di lingkungan Borongraukang karena menganggap lingkungan Samata justru saat ini semakin tersentuh dengan pengaruh warga kota dan warga pendatang serta semakin berasosiasi dalam keseharian aktivitas perkotaan yang menjadi pembawa gejala menurunnya kolektivitas masyarakat di lingkungan Samata. Beberapa responden di lingkungan Borongraukang masih cenderung menjawab setuju. Lingkungan Borongraukang yang masih diliputi oleh areal persawahan dan warga setempat masih dapat menjaga tradisi guyub atau kolektivitas masyarakat pedesaan pada umumnya.

Perubahan Sosial-Ekologi

Gambaran spesifik pada perubahan sosial-ekologi masyarakat di lingkungan Samata dan lingkungan Borongraukang dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Keterangan : SS = Sangat setuju ; S= Setuju; CS= Cukup Setuju; KS= Kurang Setuju; TS= Tidak Setuju ; SMT = Samata; BR = Borongraukang

Gambar 5 Grafik perbandingan penilaian spesifik masyarakat lokal terhadap degradasi sosial-ekologi di lingkungan Samata dan Borongraukang

Berdasarkan pada grafik mengenai perubahan sosial-ekologi memperlihatkan perbandingan spesifik mengenai penilaian krisis sosial-ekologi pada masyarakat, antara lain :

1. Adanya perbedaan yang sangat signifikan pada bagaimana warga Samata dengan warga Borongraukang menilai semakin terjadinya krisis sosial-ekologis yang dirasakan khususnya setelah pembukaan jalan baru dan pertumbuhan kompleks-kompleks pemukiman. Responden di Samata menunjukkan ketidakpuasannya terhadap perubahan sosial-ekologis setelah semakin masuknya pembangunan kota di dalam wilayah lingkungan Samata.

2. Sebagian besar responden di Borongraukang mengaku kurang setuju dan menilai bahwa tidak ada perubahan yang signifikan, kecuali pada kehadiran beberapa cluster pemukiman kecil yang mulai dibangun pada area

tanah-tanah kebun warga. Meskipun demikian, bilamana pemukiman-pemukiman baru semakin tumbuh dari tahun ke tahun maka proses dominasi kelas pemilik modal akan masuk mendekati pelosok desa persawahan yang berada di Borongraukang. Pada lingkungan Borongraukang yang sebagian besar bermukim para petani penyewa-penggarap dan buruh tani serta kelompok kelas bawah lainnya akan membawa kepada ketimpangan kelas yang sangat tinggi bilamana pertumbuhan warga pendatang dari kelas atas semakin meningkat. Hal ini dapat menggiring kepada potensi konflik antar kelas terutama jika kolektivitas masyarakat akan mengerucut pada budaya individualisme perkotaan.

Konseptualisasi Perubahan Sosial Ekonomi dan Ekologi Pada Masyarakat Lokal Akibat Pembangunan Mamminasata

Tahap pembangunan jalan baru yang menghubungkan kota Makassar dan wilayah kabupaten Gowa sebagai penanda tumbuhnya kawasan megapolitan secara langsung maupun tidak langsung menjadikankawasan yang berada di sekitar pembangunan infrastruktur jalan tersebut berada dalam masa transisi. Wilayah yang dahulunya diliputi oleh masyarakat tradisional agraris kemudian menjadi masyarakat agraris modern setelah mendapatkan pengaruh revolusi hijau di tahun 1970 kemudian beberapa dekade kembali mendapatkan sentuhan modernisasi kawasan pembangunan perkotaan.

Semakin dekat wilayah desa secara geografis dengan wilayah perkotaan semakin membuka peluang yang besar terhadap keterbukaan desa dengan kota. Fasilitas-fasilitas infrastruktur relatif lebih cepat terpenuhi dibandingkan desa-desa yang jauh dari kawasan perkotaan sehingga memudahkan akses energi, informasi dan transportasi merupakan dampak langsung yang dapat diterima oleh masyarakat setempat.

Fenomena dari efek kapitalisasi dari pembangunan yang menyentuh hingga ke dalam pranata-pranata kehidupan masyarakat desa, mulai dari penguasaan lahan yang memperlihatkan perubahan struktur agraria, pelapisan sosial yang juga mempengaruhi sosial-ekonomi, sosial-budaya dan sosial-ekologi masyarakat setempat telah dideskripsikan pada uraian mikro kasus di atas.

Pada bab ini akan mengulas konseptualisasi dari perubahan sosial-ekonomi, sosial-budaya dan sosial-ekologi pada masyarakat pedesaan yang membawa kepada dampak ketebelakangan yang sebenarnya mengalami reproduksi dari hubungan ketergantungan pada ranah pemerintah terhadap pihak JICA yang menuju kepada hubungan ketergantungan antara masyarakat desa terhadap kota. Berikut ini uraian analisa makro kasus yang menggambarkan bentuk-bentuk keterbelakangan di balik pembangunan megapolitan Mamminasata.

Arah disparitas masyarakat petani persawahan menuju polarisasi kelas

Pembauran masyarakat yang semakin meningkat antara desa dan kota yang merupakan efek dari pembangunan jalan baru penghubung kota Makassar dan wilayah kabupaten tersebut akan menandai adanya disparitas sosial dari kelas-kelas yang terbentuk. Kemunculan kelas petani kaya baru yang mengkomersialisasikan modal berbasis tanah yang

dilakukan petani-petani pemilik di lingkungan Samata seperti bapak SDT menyebabkan terputusnya hubungan petani penggarap dengan tanah garapannya serta tata hubungan patron-klien antara pemilik-penggarap dengan penyewa-penggarap terutama buruh tani yang terbina selama bertahun-tahun dalam mewarnai kolektivitas komunitas masyarakat pedesaan. Sementara itu, buruh tani menjadi terpisah dengan lahan yang diandalkannya sebagai sumber kehidupan dan di sisi lain tidak juga memiliki modal dan sempitnya peluang untuk menambah sumber pendapatan hidup di luar kawasan pedesaan. Kolektivitas masyarakat desa yang masih berada dalam hubungan patronase dalam usaha tani merupakan basis utama bertahannya stratifikasi sosial masyarakat. Akan tetapi, dengan semakin jelasnya kepemilikan sumberdaya pada segelintir masyarakat kelas atas dan terputusnya interaksi kolektivitas antar entitas masyarakat semakin mengarahkan desa menuju polarisasi sosial.

Semakin bebas dan terbukanya aktivitas ekonomi masyarakat dan komodifikasi bagi seluruh sumberdaya berbasis tanah hingga segala bentuk interaksi dan kelembagaan yang pada warga desa maka akan memunculkan disparitas sosial yang besar antara kelas atas dan kelas bawah di kawasan pedesaan. Roxborough (1986) juga mengemukakan tentang ketergantungan negara berkembang sebagai negara periphery seperti yang terjadi di Amerika Selatan terhadap negara maju menjadikan artikulasi pembangunan yang terjadi di negara berkembang tidak sebanding input yang didapatkan oleh negara maju dimana negara berkembang semakin mengalami keterbelakangan sementara negara maju semakin mendapatkan aliran surplus ekonomi dari produksi barang mentah. Keterbelakangan di negara berkembang menimbulkan beberapa masalah yaitu semakin banyaknya kaum marginal yang muncul di kota besar, semakin menyebarnya pemukiman kumuh. Meningkatnya jumlah kelas marginal yang bukan hanya berasal dari migrasi penduduk dari desa ke kota, tetapi juga berasal dari kelas bawah penduduk kota.

Alienasi sosial-ekologi pada kawasan pedesaan

Kawasan lingkungan Samatayang mengalami perubahan ekologi yang besar bukan hanya karena pembebasan lahan sawah menjadi badan perluasan jalan negara, tapi juga berdampak pada perubahan aktivitas sosial masyarakat yang berada di sekitarnya. Posisi lahan-lahan sawah yang masih berada di sekitar badan jalan yang melintas hingga ke kabupaten tersebut semakin teralienasi oleh serangan para teknokrat-teknokrat yang terus mengincar dan memperluas jaringan kapitalnya melalui pemukiman-pemukiman.

Alienasi ekologi pedesaan yang dimulai dari pembebasan lahan yang ditransaksikan dengan keuntungan ekonomi yang menjanjikan, terganggunya jaringan irigasi akibat pembangunan pemukiman, aktivitas penjemuran gabah masyarakat yang biasanya dilakukan di depan rumah namun terganggu akibat lalu lalang kendaraan yang melintas setiap saat merupakan beberapa situasi yang mewarnai ruang hidup pedesaan yang mulai dialienasi oleh pengaruh aktivitas penduduk kota. Alienasi ekologi ini diikuti dengan alienasi sosial, dimana disparitas sosial yang terbentuk akibat meleburnya aktivitas masyarakat desa dan kota memicu terjadinya alienasi sosial dari kelas pemilik modal dengan kelas buruh. Alienasi dapat terjadi berada pada kelas atas (overclass) maupun kelas bawah (underclass).

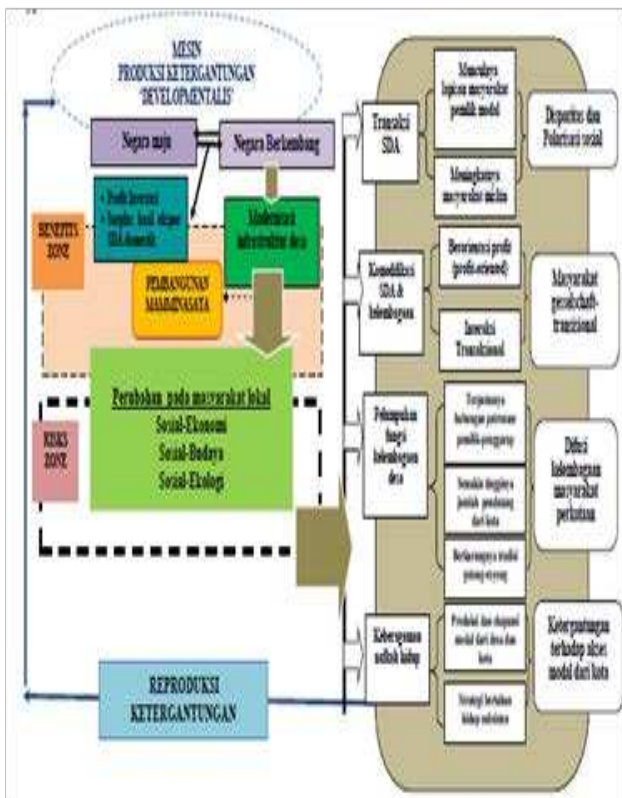
Pada lapisan kelas atas, alienasi yang dirasakan adalah terasingnya mereka dari komunitas yang dahulunya mereka berinteraksi. Seperti yang terjadi pada bapak SDT yang sudah jarang lagi terlibat bekerja di sawah, semakin jauhnya jarak sawah dan sudah tidak lagi terlibat menjadi penggarap dan semakin berkuat pada bisnis usaha dagangnya serta hanya menerima langsung hasil produksi dari petani yang menyewa-garap lahannya. Sementara itu lapisan kelas bawah semakin lenyap dengan keberadaannya karena ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan status perekonomian desa yang telah mengalami transisi menuju perekonomian yang serupa dengan masyarakat perkotaan.

Pembangunan dan reproduksi hubungan ketergantungan

Fenomena pembangunan ekonomi yang dikemukakan oleh Roxborough (1986) pada Amerika Latin mengenai penetrasi kapitalisme yang diskenarioakan oleh Komisi Ekonomi PBB untuk Amerika Latin (ECLA) dalam mengejar pertumbuhan ekonomi melalui redistribusi pendapatan, perluasan produksi pertanian dan meningkatnya konsumsi barang manufaktur yang diolah dalam negeri merupakan bentuk hubungan ketergantungan yang semakin menghisap surplus sumberdaya potensial dalam negeri. Hal ini ditandai oleh bentukan Aliansi untuk Kemajuan yang dirancang pemerintah Chili untuk membuat regulasi yang mengarah kepada pengambilalihan hacienda yang luas dan tidak efisien. Lahan-lahan pertanian yang dikelola sebelumnya secara tradisional kemudian diserahkan kepada para penyewa dalam bentuk koperasi sehingga semakin membawa kepada kapitalisme pertanian.

Hubungan ketergantungan antara negara metropolis dan negara pinggiran hingga saat ini masih berlangsung karena masih adanya kepentingan di antara keduanya. Negara metropolis akan terus mencari strategi politik agar negara pinggiran tetap mengalami ketergantungan dengan mengeksport modal untuk pembangunan di negara pinggiran, memanfaatkan sumberdaya internasional seperti modal finansial, utang luar negeri dan investasi asing. Haluan developmentalis ini didukung oleh kehadiran para teknokrat yang mendukung eksistensi pembangunan kapitalistik. Pembangunan kawasan megapolitan ini pada akhirnya akan semakin membawa haluan yang mendorong keberlanjutan reproduksi ketergantungan hingga pada wilayah pedesaan.

Sebagaimana deskripsi pada bagan di bawah ini menunjukkan bagaimana hubungan ketergantungan secara sengaja diproses di balik haluan developmentalisme yang terus-menerus melanggengkan hubungan ketergantungan pemerintah dengan Jepang (JICA). Selama kepentingan di antara keduanya masih berjalan, negara maju akan terus memberikan bantuan modal asing. JICA (Japan International Cooperation Agency) dalam hal ini berperan sebagai investor yang juga mengirimkan teknokrat-teknokrat asing pada proyek pembangunan infrastruktur pada kota megapolitan Mamminasata. Sementara itu, pembangunan berbasis modernisasi infrastruktur ini mendukung semakin besarnya peluang negara Jepang dalam bekerjasama dalam investasi ekspor sumberdaya dari Sulawesi Selatan terutama pada sumberdaya hasil laut.



Gambar 6 Reproduksi ketergantungan pada entitas masyarakat pedesaan di balik hubungan ketergantungan pemerintah terhadap negara maju

Arah pembangunan yang disalurkan melalui modernisasi infrastruktur hingga menyentuh ke kawasan masyarakat desa ini semakin mempengaruhi hingga hampir ke seluruh entitas masyarakat dari semua kelas terutama di lingkungan Samata. Kelas atas/ pemilik modal sumberdaya berbasis tanah yang merupakan bagian dari masyarakat lokal setempat justru menggunakan kesempatan ini dengan menjadikan lahan bukan hanya untuk tujuan produksi pangan dan melestarikan budaya kolektif di antara warga desa/ kawasan persawahan saja, namun juga menjadi materi yang diproduksi agar menjadi barang ekonomi yang dipedulikan karena nilainya yang semakin tinggi karena dekat dengan kutub pembangunan di kota. Tanah-tanah semakin menjadi modal transaksi ekonomi karena dimana petani mendapatkan kesempatan untuk meraup keuntungan ekonomi, kemudian dilanjutkan dengan menggunakan output ekonomi tanah tersebut dengan membeli lahan baru yang murah sehingga cakupannya lebih luas.

Tuan tanah atau petani yang telah mendapatkan keuntungan dengan akses pasar komersial akan memanfaatkan tenaga kerja para klien-nya untuk memproduksi hasil pertaniannya dengan berupa upah atau bagi hasil panen yang sebenarnya tidak sebanding dengan keuntungan yang didapatkan oleh petani pemilik. Sehingga inilah bentuk proletarisasi yang terjadi atas hubungan ketergantungan masyarakat desa terhadap akses perekonomian pasar di kota dimana interaksi transaksional antara patron dan klien semakin menjadi hubungan interaksi transaksional dengan tujuan utama yaitu menghasilkan surplus pedesaan untuk menyiapkan kebutuhan pangan bagi pasar di perkotaan. Petani penggarap atau buruh tani setempat pada kondisi seperti

ini semakin mengalami stagnasi dan proses eksploitasi yang tetap melanggengkan kemiskinan sementara yang menikmati adalah pemilik modal dan para pedagang di perkotaan.

Bentuk ketidakseimbangan hubungan berikutnya adalah seperti yang disebutkan oleh Dos Santos (1970) yaitu kondisi negara tergantung yang terus-menerus menghasilkan sumberdaya-sumberdaya produktif terhadap negara maju .

“The dependent countries these relations represent an export of profits and interest which carries off part of the surplus generated domestically and leads to a loss of control over their productive resources”

Sumberdaya yang dimaksud bukan hanya produksi bahan pangan, namun berupa lahan-lahan produktif yang diarahkan untuk dapat menaikkan nilai tambah (added value) ekonomi dimana lahan-lahan menjadi alat ekonomi baru untuk meningkatkan investasi ekonomi seperti pada bidang property dan infrastruktur lainnya. Pengalihan orientasi pembangunan ini kemudian mendisposisi lahan-lahan pertanian dari kepemilikan para petani atau masyarakat pedesaan kepada para pengusaha dan elit-elit lokal. Untuk memudahkan pengambilan surplus dalam memperdalam hubungan ketergantungan ini, sehingga pembangunan jalan dan infrastruktur melalui pembangunan kota megapolitan Mamminasata berkesinambungan dijalankan untuk membentuk kota Makassar sebagai kota metropolis yang berfungsi sebagai kutub pertumbuhan ekonomi. Kota metropolis Makassar kemudian dibangun untuk menjadi pusat aglomerasi yang menarik tumbuhnya pembangunan ekonomi pada kota kabupaten Maros, Sungguminasa dan Takalar yang merupakan kota –kota satelit yang berada di sekelilingnya.

Hubungan ketergantungan tidak cukup hanya berada pada antara negara, namun juga terjadi hingga lingkup antara ranah regional dan lokal, antara perkotaan dan pedesaan. Bila pada tingkat hubungan internasional dimana kota utama menjadi satelit bagi negara metropolis Barat, maka kota di satu sisi menjadi metropolis lokal (local metropolises) yang dikelilingi oleh kota-kota kecil lainnya sebagai kota-kota satelit. Keterkaitan hubungan yang berkesinambungan ini dengan kesadaran dibangun untuk mengarahkan pengambilan surplus ekonomi baik berupa hasil pangan, material mineral dan tambang, barang dagangan dari wilayah pedesaan hingga ke wilayah ibukota daerah yang lebih besar, provinsi, ibukota provinsi hingga menuju ke negara Barat (Suwarsono dan Y.So 2006).

Berdasarkan argumen Frank yang mengikuti pandangan Marx, bahwa kelas marjinal bukan hanya dilihat dari siapa kelas yang dieksplotasi dalam setiap struktur yang ada. Siapapun pihak yang mengalami ketergantungan tidak akan luput dari eksploitasi dari kelas di atasnya. Negara metropolis tidak akan pernah terlepas dari belenggu pemerasan/eksploitasi negara metropolis di atasnya yang semakin mengambil benefit dari kelas di bawahnya / kelas satelitnya (Roxborough 1986). Hubungan ketergantungan yang mengalami reproduksi dari ranah antara negara hingga perkotaan dan pedesaan ditunjukkan pada bagan di berikut ini. Bagan berikut menunjukkan bagaimana ketergantungan secara sengaja dibentuk dan diproses di balik haluan pembangunisme (developmentalism) yang terus-menerus melanggengkan hubungan ketergantungan

negara berkembang terhadap negara maju. Selama kepentingan di antara keduanya masih berjalan, negara maju akan terus memberikan bantuan modal asing. JICA (Japan International Cooperation Agency) dalam hal ini berperan sebagai investor yang juga mengirimkan teknokrat-teknokrat asing pada proyek pembangunan infrastruktur pada kota megapolitan Mamminasata. Sementara itu, pembangunan berbasis modernisasi infrastruktur ini mendukung semakin besarnya peluang negara Jepang dalam bekerjasama dalam investasi ekspor sumberdaya dari Sulawesi Selatan terutama pada sumberdaya hasil laut.

Sebagaimana terbentuknya zona manfaat (benefit zone) yang diberikan kepada pemerintah daerah setempat melalui modernisasi infrastruktur sehingga menguntungkan sebagian pihak, di sisi lain terdapat pula zona resiko (risks zone) yang dirasakan oleh masyarakat lokal dari pembangunan kota megapolitan ini. Pembangunan Mamminasata ini di antaranya mensyaratkan dilakukannya konversi lahan dalam jumlah yang besar. Sehingga peningkatan transaksi sumberdaya seperti jual-beli tanah di antara para pemilik tanah baik dari pemerintah, pengusaha spekulasi properti, hingga masyarakat setempat yang merupakan petani. Perubahan agraria yang membawa kepada disposisi lahan pertanian milik masyarakat lokal menimbulkan gejala baru yaitu munculnya kelas baru yang berada pada overclass dari petani pemilik lahan yang pada umumnya berasal dari pejabat desa/ tokoh masyarakat dan pemilik lahan luas. Mereka terinklusi berkat kompensasi dari pemerintah dan pemilik modal dalam pembangunan jalan dan pemukiman.

Keuntungan berupa modal ekonomi tersebut kemudian direproduksi lagi dengan mengakumulasi lahan-lahan baru, membangun bisnis perdagangan yang memanfaatkan peluang ekonomi yang serupa dengan masyarakat modern seiring semakin tingginya aktivitas interaksi masyarakat desa dan kota yang berlangsung sebagai efek dari pembangunan jalan. Sementara itu, pada underclass yang berasal dari para penggarap dan buruh tani hanya dapat memanfaatkan tenaganya untuk dapat melakukan produksi kapital sebagai buruh bangunan atau sama sekali tetap berada pada kondisi subsisten sebagai strategi bertahan hidup yakni tetap menjadi buruh tani. Kuatnya pengaruh aktivitas akumulasi kapital ini mempengaruhi hingga pada tataran kawasan masyarakat persawahan sehingga peleburan aktivitas hidup yang terus terjadi antara masyarakat desa dan kota semakin menunjukkan disparitas sosial yang besar dan mengarahkan masyarakat kepada polarisasi sosial dimana pembentukan stratifikasi kelas masyarakat desa yang semakin jelas.

Hal ini menyebabkan hampir seluruh elemen sumberdaya dan kelembagaan lokal meluruh menjadi modal komersial. Komodifikasi ini menjadikan perubahan gaya hidup masyarakat setempat khususnya pada lingkungan Samata yang lebih mengutamakan keuntungan semata (profit-oriented). Interaksi-interaksi yang berlangsung lebih cenderung kepada nilai manfaat (value of benefits) dari kepentingan yang dibangun. Pemikiran kapitalistik yang mulai menjadi hasrat bagi setiap orang hingga menyentuh ke dalam gaya hidup masyarakat desa dibuktikan dari lahannya hanya sebagai bagian dari investasi atau objek penyewaan para penggarap agar menjadi sumberdaya ekonomi rumah tangga. Orientasi masyarakat persawahan bukan hanya menghasilkan produksi pangan yang cukup namun juga berorientasi mereproduksi keuntungan dari

produksi modal material serta kekuasaan. Penggarap yang menyewa lahan hanya berinteraksi pada petani pemilik atau para pemilik lahan pada saat pembagian karung gabah hasil produksi. Kondisi ini semakin mentransisikan ke arah masyarakat patembayan (gesselshaft) yang bisa membawa kepada pelumpuhan fungsi kelembagaan desa.

Terputusnya hubungan kolektif akibat pelepasan lahan yang mewarnai situasi masyarakat desa/pertanian ini semakin merenggangkan guyubnya masyarakat dan mengarahkan kepada situasi interaksi transaksional. Hilangnya lahan sebagai sarana pertemuan kolektivitas masyarakat persawahan kemudian akan menjadi faktor utama yang dapat memutuskan interaksi warga dimana keseluruhan entitas pada komunitas persawahan yakni pemilik-penggarap, penyewa-penyakap, buruh tani serta hubungan patronase yang berlangsung di dalamnya. Arus kutub antar pengaruh kota dan desa kemudian semakin saling tarik-menarik satusama lain. Kepadatan penduduk lingkungan Samata yang lebih besar komposisi pendatangnya dibandingkan lingkungan Borongraukang merupakan salah satu faktor berikutnya yang mendukung terjadinya difusi pengaruh kelembagaan masyarakat kota. Bila gejala terbentuknya masyarakat gesselshaft semakin jelas, tradisi bekerja yang berasal semangat gotong-royong semakin tereduksi karena semua kelembagaan dilihat dari keuntungan ekonomis.

Keragaman nafkah hidup yang makin berkembang di lingkungan Samata menunjukkan bahwa petani saat ini hanya merupakan salah satu dari entitas masyarakat desa. Petani yang dahulunya masih berstatus sebagai pemilik-penggarap kemudian beralih nafkah dengan memanfaatkan peluang ekonomi di luar pertanian/luar desa baik untuk mengembangkan modal kapitalnya atau sekedar sebagai strategi bertahan hidup. Lingkungan Borongraukang yang belum mendapatkan pengaruh langsung dari pembangunan jalan negara belum menunjukkan fenomena tersebut dan saat ini masyarakat setempat masih mengandalkan aktivitas di sektor pertanian. Namun tidak dapat dipungkiri, sumber-sumber daya nafkah dari luar desa sudah mulai menjadi alternatif masyarakat sebagai strategi pertahanan ekonomi rumah tangga mereka.

Kapitalisme ibarat kutub kuat yang menarik kehidupan sedikit demi sedikit dari setiap entitas desa untuk semakin tergantung dengan kelembagaan tata produksi kapital yang semakin mengaburkan eksistensi produksi pangan yang berbasis masyarakat desa yang seharusnya diwarnai oleh nuansa kolektivitas yang sangat erat satu sama lain. Para petani pemilik tanah mengaku ingin mempertahankan tanah sebagai eksistensi hidup sebagai masyarakat asli akan tetapi sangat sulit untuk memungkiri bahwa kebutuhan hidup yang semakin meningkat di masa depan dan standar hidup yang semakin berdifusi dengan masyarakat perkotaan akan menjadi sebab eksistensi lahan sawah semakin terancam oleh pembangunan infrastruktur kota karena telah menilai lahan sebagai salah satu modal kapital yang bernilai tinggi.

Bentuk-bentuk keterbelakangan inilah yang merupakan lingkaran proses reproduksi oleh mesin produksi ketergantungan yang terus digerakkan oleh hubungan negara berkembang terhadap negara maju. Ketergantungan masyarakat terhadap kapital dari hubungan politik-ekonomi tersebut mempengaruhi seluruh masyarakat hingga di kawasan pedesaan yang akhirnya semakin cenderung mengikuti peradaban kota. Sementara

itu masyarakat kota di negara berkembang semakin ditarik oleh tarikan pembangunan negara maju melalui modernisasi dalam segala bidang, mengandalkan investasi asing untuk pembangunan dan pada akhirnya hasil surplus sumberdaya alam dihisap keluar menuju negara mitra yang adidaya tersebut. Proses keterbelakangan yang terus-menerus dimotori oleh mesin-mesin developmentalism dimana pemerintah masih bergantung dengan donasi serta model pembangunan negara maju menyebabkan negara berkembang tetap berada pada posisi negara pinggiran dimana pemindahan surplus sumberdaya dalam negeri terhadap Negara maju akan terus menghasilkan ketimpangan dan hubungan asimetris.

PENUTUP

Kesimpulan

Hasil studi dari penelitian mengenai pengaruh pembangunan Mamminasata pada Kelurahan Samata yang terdiri dari dua lingkungan, Kelurahan Samata dan Kelurahan Borongraukang mengungkapkan beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Terjadinya perubahan sosial-ekonomi, sosial-budaya dan sosial- ekologi pada kedua lokasi tersebut, antara lain : Pada dimensi sosial-ekonomi, perubahan yang paling besar terjadi di lingkungan Samata yang secara geografis merupakan kawasan yang terkena langsung pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur adalah perubahan penguasaan lahan dimana terjadi peningkatan yang sangat tinggi pada konversi lahan dan transaksi tanah yang dilakukan oleh warga. Keterbukaan warga Samata terhadap sektor nafkah di perkotaan semakin besar, meskipun demikian tidak menutup kemungkinan pula bagi warga Borongraukang yang mendapat pengaruh besar dari intensitas aktivitas ekonomi warga Samata sehingga dampaknya menjadikan warga khususnya para petani Borongraukang semakin banyak yang melakukan sistem nafkah ganda di luar desa.
2. Pada perubahan sosial-budaya, lingkungan Samata justru saat ini semakin terbuka dengan pengaruh warga kota dan warga pendatang serta semakin berasosiasi dalam keseharian aktivitas perkotaan yang menjadi pembawa gejala menurunnya kolektivitas masyarakat di lingkungan Samata dibandingkan lingkungan Borongraukang.
3. Perubahan sosial-ekologi pedesaan yang dimulai dari pembebasan lahan yang ditransaksikan dengan keuntungan ekonomi yang menjanjikan, teralihnya secara drastis nafkah petani yang terkonversi lahan garapannya, terganggunya jaringan irigasi akibat pembangunan pemukiman, aktivitas pengeringan gabah masyarakat yang biasanya dilakukan di depan rumah yang terganggu akibat hilir mudik kendaraan yang melintas setiap saat merupakan beberapa situasi yang mewarnai ruang hidup pedesaan yang mulai dialienasi oleh pengaruh aktivitas penduduk kota.
4. Ketergantungan masyarakat terhadap produksi komoditas dari negara maju serta menerima konsep modernisasi pembangunan dalam segala aspek kehidupan inilah yang merupakan gejala reproduksi ketergantungan. Produksi ketergantungan terus

dijalankan melalui hubungan negara berkembang terhadap negara maju hingga dapat menyentuh ruang kawasan pedesaan yang mengalami hubungan ketergantungan terhadap perkotaan. Ketergantungan negara berkembang terhadap negara maju menyebabkan munculnya bentuk-bentuk keterbelakangan berupa disparitas sosial, terbentuknya masyarakat individual (gesselschaft) transisional, difusi kelembagaan masyarakat perkotaan dan ketergantungan terhadap akses modal dari kota di kawasan persawahan khususnya di Kelurahan Samata.

Saran

Berdasarkan simpulan di atas, pembangunan kawasan kota yang terintegrasi dan melibatkan lahan-lahan pertanian produktif harusnya tidak hanya mengakomodasi melalui pembayaran kompensasi terhadap para pemilik lahan saja, namun juga harus memperhatikan dan mengganti nilai kerugian yang dialami penggarap dan buruh tani yang menggantungkan hidupnya pada lahan yang diproduksinya selama berusaha tani di lahan tersebut.

Perlu adanya perhatian dari pemerintah daerah setempat melalui kebijakan pembangunan yang dapat mengurangi disparitas, marginalisasi masyarakat lokal serta alienasi sosial-ekologi yang terjadi di balik pembangunan megapolitan Mamminasata sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh semua kelas masyarakat. Beberapa hal menjadi rekomendasi dalam penelitian ini diantaranya adalah:

1. Konversi lahan dengan tujuan pembangunan maupun kesejahteraan penduduk merupakan salah satu alternatif yang bisa dilakukan penduduk. Namun konversi yang dilakukan juga perlu mempertimbangkan dampak yang terjadi pada ekologi dan ekosistem sekitarnya.
2. Perlu dilakukannya penyuluhan maupun pelatihan dari kelompok yang bekerjasama dengan Pemerintah Desa dengan tujuan memberikan motivasi dan meningkatkan partisipasi kepada penduduk dalam kegiatan rehabilitasi mangrove.
3. Perlu adanya ketegasan Pemerintah Desa dalam mensosialisasikan Peraturan Desa yang membahas fungsi dan manfaat mangrove kepada penduduk lokal.
4. Perlu adanya perhatian lebih seperti upaya manajemen dan evaluasi dari Dinas Kehutanan maupun instansi terkait konversi dan rehabilitasi yang ada di Desa Karangsong.

DAFTAR PUSTAKA

- Brymant, A 2004. *Social Research Methods* 2nd Edition. Oxford University Press : New York.
- Dos Santos, Theotonio. 1970. The structure of dependence (60/231). *The American Economic Review* Eighty-Second Annual Meeting of The American Association.
- JICA 2008. *Final Report Volume 2 Feasibility Study : The Study on Arterial Road Network Development Plan for Sulawesi Island and Feasibility Study on Priority Arterial Roads in South Sulawesi Province.*

Republic of Indonesia Ministry of Public Works-
Nippon KOEI, KRI International Corp, ALMEC
Corporation : Yokohama.

Li, Tania M 2012. *The Will To Improve: Perencanaan, Kekuasaan, dan Pembangunan di Indonesia* (penerjemah Hery Santoso dan Pujo Semedi). MarjinKiri : Jakarta.

Lubis, AY dan Donny G. Adian 2007. *Pengantar Filsafat Ilmu Pengetahuan : Dari David Hume Sampai Thomas Kuhn*. Penerbit Koeskoesan : Depok

Roxborough, Ian 1986. *Teori-Teori Keterbelakangan*. LP3ES : Jakarta

Sutiksno 2012. Konsep pengembangan kota baru yang berkelanjutan kawasan metropolitan mamminasata (03:12). *Buletin Mamminasata : Mengurai Benang Kusut Kemacetan di Kawasan Perkotaan Mamminasata*. Dinas tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan

Vago, S 1980. *Social Change*. Prentice Hall : New Jersey